BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan dunia usaha yang pesat mengakibatkan banyak perusahaan besar yang berkembang saat ini, hal ini bertujuan searah dengan pertanggung jawaban sosial yang harus dilakukan oleh perusahaan. Pertanggung jawaban sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan mempertanggungjawabkan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya. Penelitian yang dilakukan oleh Rice (2017) menjelaskan bahwa *corporate social responsibility* memberikan pemahaman bahwa perusahaan memiliki kemampuan dan rasa tanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan lingkungan sekitar perusahaan tersebut beroperasi. Pengungkapan *corporate social responsibility* memang tidak memberikan profit kepada perusahaan dalam jangka pendek tetapi CSR memberikan keuntungan dimasa datang, oleh karena itu hasil akhir dari strategi CSR akan menjadi investasi penting bagi perusahaan.

Tanggung jawab sosial perusahaan atau lebih dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan sebuah tindakan yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada lingkungan, sosial, dan masyarakat setempat yang berada disekitar perusahaan atas dampak dari kegiatan yang dilakukan perusahaan. Pelaksanaan CSR yang semulanya dianggap sebagai kewajiban yang akan menambah biaya atau beban perusahaan, namun secara jangka panjang, tanggung jawab sosial dapat mendatangkan

keuntungan atau manfaat tertentu. CSR yang awalnya dianggap beban akan berubah menjadi suatu investasi strategis, karena mendatangkan keuntungan yang tidak ada habisnya bagi perusahaan (Jayanti dan Husaini, 2018).

CSR merupakan bentuk komitmen perusahaan yang menekankan bahwa perusahaan harus mengembangkan etika bisnis dan praktik bisnis yang berkesinambungan secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Konsep ini berkaitan dengan perlakuan terhadap *stakeholder* baik yang berada di dalam dan di luar perusahaan secara bertanggungjawab baik secara etika maupun sosial. Tanggung jawab sosial pada dasarnya adalah bagaimana perusahaan memberi perhatian kepada lingkungannya, terhadap dampak yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan alat manajerial yang digunakan perusahaan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan dengan masyarakat sekitar perusahaan. Selain itu, pengungkapan tanggung jawab sosial dapat dipandang sebagai wujud akuntabilitas perusahaan kepada publik untuk menjelaskan berbagai dampak sosial yang ditimbulkan perusahaan. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan harus dapat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, berhubungan dengan meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan keluarganya serta komunitas lokal dan masyarakat luas. Hal ini dapat dilakukan dengan mengerti aspirasi dan kebutuhan *stakeholders* selanjutnya untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan para *stakeholder*.

Peraturan mengenai *Corporate Social Responsibility* di Indonesia telah diatur dalam UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dan

Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan PT. UU No. 40 tahun 2007 menjelaskan perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha yang berhubungan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Pasal 66 ayat 2c UU No. 40 tahun 2007 telah dijelaskan semua perseroan wajib untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan.

Konsep CSR menjelaskan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya terhadap pemiliknya atau pemegang saham saja tetapi juga berhubungan terhadap para *stakeholder* dan atau terkena dampak dari keberadaan perusahaan. Perusahaan yang menjalankan aktivitas CSR akan memperhatikan dampak operasional perusahaan terhadap kondisi sosial dan lingkungan dan berupaya agar dampaknya positif. Konsep CSR ini diharapkan mengurangi kerusakan lingkungan yang terjadi di dunia, mulai penggundulan hutan, polusi udara dan air, hingga perubahan iklim. Beberapa dampak dari keberadaan perusahaan ditengah-tengah masyarakat telah menyadarkan masyarakat di dunia bahwa sumber daya alam adalah terbatas dan karenanya pembangunan ekonomi harus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan konsekuensi bahwa perusahaan dalam menjalankan usahanya perlu menggunakan sumber daya dengan baik. Kesadaran *stakeholder* akan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh perusahaan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan praktik-praktik atau kegiatan CSR yang dilakukan. Lebih lanjut lagi bahwa tekanan *stakeholder* terhadap perusahaan untuk dapat secara efektif menjalankan kegiatan lingkungannya serta tuntutan agar perusahaan menjadi akuntabel juga

menyebabkan meningkatnya perusahaan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial.

Alat ukur *Corporate Social Responsibility* diproksikan ke dalam pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, dimana penelitian menggunakan checklist yang mengacu berdasarkan *Global Reporting Initiative* (GRI) G.4 didalamnya terdiri dari 3 komponen utama yaitu ekonomi, lingkungan hidup, dan kinerja sosial yang menyangkut praktik tenaga kerja, hak asasi manusia, sosial dan tanggungjawab produk. CSRD diukur dengan angka indeks *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* (CSRDI) hasil *content analysis*, berdasarkan indikator GRI (*Global Reporting Initiatives*)-G4 yang terdiri dari 91 item. Indikator GRI dipilih karena merupakan aturan internasional yang telah diakui oleh perusahaan di dunia. Pendekatan untuk menghitung CSRDI pada dasarnya menggunakan pendekatan dikotomi yaitu item CSR diberi score 1 jika diungkapkan dan score 0 jika tidak diungkapkan (Pradipta, 2015). Selanjutnya skor dari setiap item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan.

Menurut penelitian sebelumnya, beberapa faktor utama yang diduga dapat mempengaruhi CSR meliputi profitabilitas, likuiditas, dan *leverage*. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2017). Profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan dengan *Return on Equity* (ROE). ROE merupakan suatu indikator keuangan yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atas modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi rasio ini

semakin baik yang dapat diartikan posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya. Menurut Sartono (2001) Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisa profitabilitas ini. Menurut penelitian Riyanto (2001) menyatakan profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.

Likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek (Kasmir, 2017). Fungsi lain rasio likuiditas adalah untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan (likuiditas badan usaha) maupun di dalam perusahaan (likuiditas perusahaan). Rasio likuiditas juga dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang– hutang (kewajiban) jangka pendeknya yang jatuh tempo, atau rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajibannya saat ditagih. Likuiditas dapat diukur dengan ratio lancar (*current ratio*). Semakin tinggi angka ratio likuiditas, akan semakin baik bagi investor. Perusahaan yang diminati investor adalah perusahaan yang mempunyai rasio likuiditas yang cukup tinggi untuk standar perusahaan sejenisnya. Menurut Kamil dan Herusetya (2012), likuiditas merupakan suatu indikator kemampuan entitas untuk membayar semua liabilitas finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aset lancar yang tersedia. Sependapat dengan Kamil dan Herusetyo (2012), Sutrisno (2003) juga

berpendapat bahwa likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo.

Rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang (Kasmir, 2017). Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi). Dalam praktiknya, apabila dari hasil perhitungan, perusahaan ternyata memiliki rasio *leverage* yang tinggi, hal ini akan berdampak timbulnya risiko kerugian lebih besar, tetapi juga ada kesempatan mendapat laba besar juga. Sebaliknya apabila perusahaan memiliki rasio *leverage* lebih rendah tentu mempunyai risiko kerugian lebih kecil pula, terutama pada saat perekonomian menurun. Rasio *leverage* yang baik mampu menyeimbangkan pengembalian yang tinggi dengan risiko yang dihadapi. Rasio *leverage* dapat diukur dengan mengukur *debt to equity ratio*, yaitu menghitung perbandingan antara total utang dengan total ekuitas. Menurut Irawati (2006), *leverage* merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam hal menginvestasikan dana yang disertai dengan adanya biaya tetap yang harus ditanggung perusahaan. Pengertian *leverage* menurut Sartono (2010) *leverage* adalah : “*Leverage* adalah penggunaan aset dan sumber dana (*sources of funds*) oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham”.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dengan menambahkan variabel kepemilikan perusahaan dan *good corporate governance*, juga digunakan untuk mendukung pengungkapan CSR. Kepemilikan perusahaan yang diproksikan dengan kepemilikan keluarga dan kepemilikan manajemen, dan *good corporate governance* yang diproksikan dengan ukuran dewan komisaris dan komite audit.

Kepemilikan perusahaan menurut Giuli *et al.* (2020), struktur kepemilikan perusahaan terjadi karena adanya perbandingan jumlah pemilik saham dalam perusahaan. Sebuah perusahaan dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, masyarakat luas, pemerintah, pihak asing, maupun orang dalam perusahaan atau manajerial. Kepemilikan bersama tersebut berpengaruh terhadap keuangan perusahaan yang terbatas pada aktivitas *merger* dan akuisisi. Dalam penelitian ini kepemilikan perusahaan diukur menggunakan proksi yaitu kepemilikan keluarga dan kepemilikan manajemen.

Kepemilikan keluarga adalah suatu kepemilikan yang terkonsentrasi karena persentase jumlah saham yang dimiliki pihak keluarga paling besar (Hermawan, 2009). Menurut penelitian Khan *et al.*, (2013) perusahaan keluarga merupakan perusahaan yang paling banyak di Bangladesh dengan budaya dewan direksi yang kuat sehingga sering mengindahkan prinsip-prinsip dari *corporate governance*. Nama dewan direksi dan dewan komisaris dapat menjadi salah satu cara mengetahui kepemilikan keluarga. Menurut Setyawan (2016) perusahaan dengan kepemilikan keluarga yang tinggi dan pemilihan strategi bisnis yang tepat

akan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga dampak positif akan timbul dan berujung pada kinerja yang baik untuk keberlangsungan perusahaan.

Kepemilikan manajemen adalah para pemegang saham yang berarti dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada perusahaan, biasanya dinyatakan sebagai nilai saham perusahaan yang beredar yang dimiliki oleh orang dalam perusahaan yaitu manajer, dewan komisaris dan dewan direksi (Domash, 2009 dalam Priantara *et al.*, 2011). Menurut Karina *et al.*, 2014 menemukan bahwa kepemilikan manajemen berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Karena dengan semakin besar kepemilikan manajemen di dalam perusahaan, manajer perusahaan akan semakin banyak mengungkapkan informasi sosial.

Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan adalah sistem pengendalian internal perusahaan yang bertujuan untuk mengelola resiko yang mungkin terjadi yang nantinya berguna untuk tujuan bisnisnya melalui penjagaan aset perusahaan serta meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang (Effendi, 2009). Penelitian ini, *good corporate governance* diukur menggunakan proksi yaitu ukuran dewan komisaris dan komite audit. Ukuran dewan komisaris adalah jumlah anggota dewan komisaris di perusahaan itu sendiri. Dewan komisaris merupakan sistem pengendalian internal tertinggi yang akan bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan secara kondusif (Mutia *et al.*, 2011). Penelitian ini dilakukan oleh Wandayani dan Yusar (2015) menyebutkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu Karina dan

Husaini (2018) yang menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

Komite audit merupakan komite yang membantu komisaris atau dewan pengawas dalam menentukan efektifitas sistem pengendalian internal dan efektifitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal menurut penelitian (Alijoyo 2003 dalam Priantana *et al.*, 2011). Penelitian yang dilakukan oleh Krisna & Suhardianto (2016), Nurfadilah & Sagara (2015), Restu *et al.*, (2017), Rochayatun (2016), Zahra *et al.*, (2014) menemukan komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Jaenal dan Siska (2020) menyebutkan bahwa Ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Selain penambahan variabel kepemilikan perusahaan dan *good corporate governance* yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan menambah periode penelitian yang sebelumnya hanya empat tahun menjadi lima tahun penelitian dari tahun 2016-2020.

Beberapa saham perusahaan sektor pertambangan menurun pada IHSG sepanjang 2019. Indeks sektor saham pertambangan tumbuh negatif sebesar 12,83%. Menurut analisis dari Henan Putihrai Sekuritas Liza Camelia Suryanata menilai kinerja indeks sektor pertambangan yang turun drastis tidak lepas dari menurunnya harga batubara sepanjang tahun 2019, hal ini disebabkan oleh pasokan batubara di pasar global yang berlebih. Selain itu, menurut Lisa komoditas pertambangan, baik batubara maupun logam masih bergantung pada perkembangan perang dagang antara Amerika Serikat dengan China. Di sisi lain

menurut analisis dari Artha Sekuritas Nugroho Rahmat Fitriyanto menilai bahwa pergerakan indeks sektor pertambangan diberatkan oleh perusahaan-perusahaan batubara karena harga batubara menurun secara signifikan pada tahun 2019, sehingga dapat menyebabkan harga jual dan margin ikut tertekan (www.idx.co.id).

Beberapa perusahaan pertambangan batubara mengalami pergerakan harga saham yang negatif pada tahun 2019. Misalnya saham PT Bukit Asam (PTBA) mengalami penurunan harga sebesar 38,14%, lalu saham PT Indika Energy Tbk (INDY) mengalami penurunan sebesar 24,61%, saham pada PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) mengalami penurunan yang parah hingga 43,33%. Secara kinerja, perusahaan-perusahaan batubara dapat dikatakan kurang baik hingga periode kuartal- III di tahun 2019. Contohnya, PT Bukit Asam (PTBA) laba bersihnya juga menurun drastis sebesar 21,08% menjadi Rp 3,10 triliun. Sementara PT Indika Energy Tbk (INDY) mengalami kerugian bersih sebesar US\$ 8,60 juta pada kuartal III tahun 2019 padahal sebelumnya INDY mampu menghasilkan laba bersih hingga US\$ 112,2 juta. Nugroho menilai saham perusahaan tambang logam menjadi penyelamat bagi indeks sektor pertambangan. Misalnya pada PT Vale Indonesia Tbk (INCO) harga sahamnya naik sebesar 11,66% lalu harga saham PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) naik sebesar 52,86% begitu juga dengan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) menguat sebesar 9,08% (www.idx.co.id).

Gambar 1.1
Rata-rata Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Perusahaan Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020

Sumber: idx.co.id diolah oleh penulis, 2022

Fenomena CSR yang terjadi pada perusahaan sektor pertambangan saat ini salah satunya yaitu ada perusahaan yang menyalurkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak sesuai regulasi. Bahkan ada sejumlah perusahaan yang tidak melaporkan penyaluran CSR tersebut. Menurut Isran (2022) mengungkapkan perusahaan tambang yang memangkas penyaluran dana CSR salah satunya adalah PT Kaltim Prima Coal (KPC). Dimana perusahaan tersebut hanya menyalurkan USD 5 juta atau setara Rp 73 miliar sementara yang seharusnya disalurkan dananya sejumlah USD 20 juta atau Rp 292 miliar. Menanggapi pernyataan tersebut, Koordinator Koalisi Pemuda IKN (KOPI-KN) Viko Januardhy meminta adanya perubahan besaran dana CSR bagi perusahaan tambang di Kaltim. Mengingat setiap tahun jumlah produksi tambang batu bara terus mengalami peningkatan, namun dana CSR yang dikeluarkan tetap sama (detik.com).

Adapun kasus lain dari PT Bayan Resource yang diduga ada aliran dana CSR ke luar Kalimantan sebesar Rp 200 M. Sehingga ratusan massa yang

tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kaltim melakukan aksi demo di depan kantor PT Bayan Resource yang ada di Balikpapan. Massa menuntut pihak PT Bayan Resource untuk bertindak adil dalam penyaluran dana CSR. Penyebab polemik yang berkembang saat ini adalah adanya aliran dana CSR kepada tiga Perguruan Tinggi yang ada di Pulau Jawa sebesar Rp 200 M. Diketahui, PT Bayan Resource diduga memberikan bantuan dana CSR sebesar Rp 200 M kepada Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Jumlah tersebut berbeda jauh dengan penyaluran dana kepada masyarakat di Kaltim, yakni sebesar Rp167 M. Hal tersebut tentu di rasa tidak adil bagi masyarakat Kaltim itu sendiri sehingga masyarakat merasa geram dengan menuntut PT Bayan Resource agar bertindak adil kedepannya (kompas.com).

Kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia bersifat wajib. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang di prediksi dalam penelitian ini antara lain profitabilitas, likuiditas, *leverage*, kepemilikan perusahaan, dan *good corporate governance*. Karena menurut penulis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosial diantaranya, profitabilitas, likuiditas, *leverage*, kepemilikan perusahaan, dan *good corporate governance*.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, LEVERAGE, KEPEMILIKAN PERUSAHAAN DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN**

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016-2020)”.

1.2 Ruang Lingkup

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis membatasi ruang lingkup pokok bahasan dalam permasalahan sebagai berikut:

1. Meneliti mengenai profitabilitas, likuiditas, *leverage*, kepemilikan perusahaan yang meliputi kepemilikan keluarga, kepemilikan manajemen, *Good Corporate Governance* yang meliputi ukuran dewan komisaris, komite audit terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (tanggung jawab sosial perusahaan).
2. Objek penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Periode penelitian ini dimulai tahun 2016-2020.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maraknya kasus CSR yang terjadi pada perusahaan sektor pertambangan saat ini salah satunya yaitu ada perusahaan yang menyalurkan dana CSR tidak sesuai regulasi. Bahkan ada sejumlah perusahaan yang tidak melaporkan penyaluran CSR tersebut.

Beberapa saham perusahaan sektor pertambangan menurun pada sehingga dapat menyebabkan harga jual dan margin ikut tertekan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk menguji pengaruh antara variabel profitabilitas, likuiditas, *leverage*, kepemilikan perusahaan yang terdiri dari kepemilikan keluarga dan kepemilikan manajemen, dan *good corporate governance* yang terdiri dari ukuran dewan komisaris dan komite auditerhadap pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020. Tujuan penelitian ini menggunakan teori *stakeholder* untuk mendukung pengungkapan CSR.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, diantaranya:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Dilihat secara teoritis, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan, pengalaman, wawasan, juga referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai hubungan antara profitabilitas, likuiditas, *leverage*, kepemilikan perusahaan (kepemilikan keluarga, kepemilikan manajemen), *good corporate governance* (ukuran dewan komisaris, komite audit) terhadap CSR (*Corporate Social Responsibility*).

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang menggunakan informasi ini, seperti:

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perusahaan dalam luas pengungkapan pertanggung jawaban CSR.

b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai laporan tahunan keuangan perusahaan sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan keputusan investasi.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai seluruh kegiatan sosial perusahaan yang telah dilaksanakan dan dapat menjadi bahan perbandingan antara apa yang sudah diungkapkan perusahaan dengan yang sudah terealisasi di lingkungan sekitar.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat diharapkan mampu menjadi tambahan referensi dalam bahan penelitian terhadap pengaruh profitabilitas, likuiditas, *leverage*, kepemilikan perusahaan, *good corporate governance* terhadap pengungkapan CSR.